

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DI WILAYAH JABODETABEK TAHUN 2016 - 2018**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata  
I pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh:  
RIZAL MIVTACH EL FALACH  
B 200 160 248**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DI WILAYAH  
JABODETABEK TAHUN 2016 - 2018**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**RIZAL MIVTACH EL FALACH**

**B 200 160 248**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



**Dra. Rina Trisnawati, M.Si., Akt., Ph.D., CA**

**NIDN: 0624026901**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI**  
**WILAYAH JABODETABEK TAHUN 2016 – 2018**



Yang ditulis oleh:

**RIZAL MIVTACH EL FALACH**

**B 200 160 248**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Sabtu, 04 Juli 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi isyarat

Dewan penguji:

1. Dra. Rina Trisnawati, M.Si., Akt., Ph.D., CA (  )  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Suyatmin W.A., M.Si (  )  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dra. Nursiam, Ak, M.H (  )  
(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



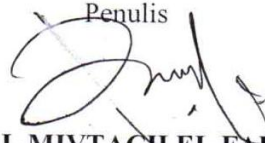
### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 Mei 2020

Penulis



**RIZAL MIVTACH EL FALACH**

**B 200 160 248**

## **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH JABODETABEK TAHUN 2016-2018**

### **Abstrak**

Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik tentunya wajib menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam aturan konstitusi yang berlaku serta memegang prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan atas keterbukaan informasi dan regulasi yang sudah mengatur bagaimana pengelolaan otonomi daerah mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek pada tahun 2016-2018. Data yang digunakan dari penerimaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penelitian ini dilakukan berpedoman pada metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan rasio kemandirian wilayah Jabodetabek mendapatkan rata-rata tingkat kemandirian yang sangat efektif. Rasio Efektifitas Pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek dapat dikatakan memiliki tingkat efektifitas yang sangat baik. Rasio Efisiensi Pemerintah di wilayah Jabodetabek memiliki tingkat efisiensi yang kurang baik. Rasio keserasian belanja Pemerintah di wilayah Jabodetabek memiliki tingkat keserasian belanja yang baik dikarenakan belanja langsung yang lebih besar dari belanja tidak langsung. Rasio Pertumbuhan pemerintah di wilayah Jabodetabek jika dilihat dari rasio pertumbuhan selama 3 tahun (2016-2018) mengalami kenaikan dengan interval 5% - 17%. Pemerintah di wilayah Jabodetabek diharapkan terus menggali potensi yang ada agar kedepannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendapatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci** : analisis kinerja keuangan, anggaran pendapatan , belanja daerah, realisasi anggaran.

### **Abstract**

Regional governments as public sector organizations must of course carry out their duties as mandated in the applicable constitutional rules and hold the principle of real and responsible autonomy. The demand for information disclosure and regulations that have governed how the management of regional autonomy emphasizes the need for good and correct financial management, to see how well and correctly a financial management needs to be measured Financial Performance. The purpose of this study was to analyze the financial performance of local governments in the Greater Jakarta area in 2016-2018. Data used from the revenue and realization of regional revenue and expenditure budget. This research was conducted based on the descriptive method with a quantitative approach. The results showed based on the independence ratio of the Greater Jakarta area getting

an average level of independence that is very effective. Effectiveness Ratio Local government in the Greater Jakarta area can be said to have a very good level of effectiveness. The Efficiency Ratio The government in the Greater Jakarta area has a level of efficiency that is not good. The ratio of expenditure harmony The government in Jabodetabek region has a good level of expenditure harmony due to direct spending which is greater than indirect expenditure. The growth ratio of the government in the Greater Jakarta area when viewed from the growth ratio for 3 years (2016-2018) has increased at intervals of 5% - 17%. The government in the Jabodetabek area is expected to continue to explore the existing potential so that in the future it can increase local revenue so that it can get more effective and efficient performance as a real effort to improve the welfare of the community.

**Keywords** : financial performance analysis, revenue budget, regional expenditure budget realization.

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman dan kemudahan akses terhadap informasi memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan diberbagai sektor. Sektor pemerintahan juga mengalami perubahan. Banyak sekali perubahan yang membawa dampak positif terhadap tata kelola masyarakat. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik dan tidak berlaku sewenang – wenang. Sistem kekuasaan indonesia sejatinya hanya terdapat 3 elemen, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Komponen tersebutlah yang nantinya akan mengatur dan mengelola pemerintahan di indonesia.

Era reformasi memberikan perubahan paradigma secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma dapat dilaksanakan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU no 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang telah diubah menjadi UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah (Ramadhani, 2016).

Sebagai bentuk penyempurnaan atas peraturan yang sudah berjalan maka dibuatlah UU no. 23 tahun 2014 yang mengatur tentang sistem pemerintahan. Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan telah terjadi desentralisasi sehingga

memberikan kemudahan kontrol dibanding dengan sentralisasi, setelah diberlakukannya undang undang tersebut maka Pemerintah Daerah telah diberikan tanggung jawab yang mengharuskan Pemerintah Daerah lebih berperan aktif dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan yang merupakan konsekuensi dari otonomi daerah (fajriansyah,elim,walandouw, 2019)

Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik tentunya wajib menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam aturan konstitusi yang berlaku serta memegang prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Masyarakat harus mengetahui bagaimana jalanya pemerintahan yang ada dan pemerintah daerah wajib menyampaikan bagaimana pengelolaan uang rakyat yang digunakan tersebut. Tuntutan atas keterbukaan informasi dan regulasi yang sudah mengatur bagaimana pengelolaan otonomi daerah mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis (Mardiasmo, 2004:182).

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis akan melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Jabodetabek Tahun 2016-2018”**. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan pada pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek pada tahun 2016-2018.

## **2. METODE**

Jenis Penelitian yang dilakukan berpedoman pada metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Populasi penelitian ini adalah Pemerintah di wilayah JABODETABEK tahun anggaran 2016-2018. Sampel dalam penelitian ini adalah penerimaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di wilayah JABODETABEK tahun anggaran 2016-2018.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada data penerimaan dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015-2018 pada wilayah JABODETABEK. Data tersebut diperoleh dari website [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Teknik analisis data menggunakan analisis rasio keuangan dengan cara menghitung, membandingkan, menganalisis dan menarik kesimpulan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Rasio Kemandirian

Tabel 1. Rasio Kemandirian  
Pemerintah di wilayah Jabodetabek tahun 2016-2018 dalam %

NO	Provinsi / kabupaten dan kota	2016	2017	2018	Rata- rata	Kriteria
1	DKI Jakarta	242	231	284	252	Sangat Baik
2	Kab. Bekasi	99	125	108	111	Sangat Baik
3	Kab. Bogor	85	111	104	100	Sangat Baik
4	Kab. Tangerang	125	163	163	150	Sangat Baik
5	Kota Bogor	71	91	86	83	Sangat Baik
6	Kota Depok	82	104	91	92	Sangat Baik
7	Kota Bekasi	96	121	121	113	Sangat Baik
8	Kota Tangerang	128	151	139	139	Sangat Baik
9	Kota Tangerang Selatan	159	187	182	176	Sangat Baik
<b>Rata-rata</b>		<b>121</b>	<b>143</b>	<b>142</b>		<b>135</b>

Berdasarkan perhitungan Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah di wilayah Jabodetabek tahun 2016-2018 menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Berdasarkan



Tabel 1 tingkat kemandirian daerah di wilayah Jabodetabek termasuk dalam kategori yang tinggi yakni sangat baik.

### 3.2 Rasio Efektifitas

Tabel 2. Rasio Efektifitas

Pemerintah di wilayah Jabodetabek tahun 2016-2018 dalam %

NO	Provinsi / kabupaten dan kota	2016	2017	2018	Rata- Rata	Kriteria
1	DKI Jakarta	94	106	97	99	Efektif
2	Kab. Bekasi	118	121	106	115	Sangat Efektif
3	Kab. Bogor	114	138	119	124	Sangat Efektif
4	Kab. Tangerang	129	169	118	139	Sangat Efektif
5	Kota Bogor	115	134	104	118	Sangat Efektif
6	Kota Depok	116	132	104	117	Sangat Efektif
7	Kota Bekasi	100	109	82	97	Efektif
8	Kota Tangerang	109	133	117	120	Sangat Efektif
9	Kota Tangerang Selatan	112	123	111	115	Sangat Efektif
<b>Rata-rata</b>		<b>112</b>	<b>129</b>	<b>107</b>	<b>116</b>	

Berdasarkan perhitungan Rasio efektifitas pemerintah di wilayah Jabodetabek tahun 2016-2018 menunjukan tingkat Efektifitas di wilayah Jabodetabek rata-rata menunjukan angka diatas 100%. Dari tabel tersebut tingkat efektifitas Jabodetabek termasuk dalam kategori sangat efektif karena presentase dari 9 daerah yang menjadi sampel, terdapat 7 daerah yang mendapat presentase dengan kriteria sangat efektif (diatas 100%). Sementara 2 daerah lain, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan kota bekasi mendapat predikat efektif. Provinsi DKI jakarta mendapat presentase sebesar 99% dan Kota bekasi mendapat presentase sebesar 97%..

### 3.3 Rasio efisiensi

Tabel 3. Rasio Efisiensi  
Pemerintah di wilayah Jabodetabek tahun 2016-2018 dalam %

NO	Provinsi / kabupaten dan kota	2016	2017	2018	Rata- Rata	Kriteria
1	DKI Jakarta	88	79	100	89	Cukup Efisien
2	Kab. Bekasi	107	97	97	100	Kurang Efisien
3	Kab. Bogor	108	99	100	102	Tidak Efisien
4	Kab. Tangerang	94	94	107	98	Kurang Efisien
5	Kota Bogor	98	98	103	100	Kurang Efisien
6	Kota Depok	111	94	95	100	Kurang Efisien
7	Kota Bekasi	104	105	103	104	Tidak Efisien
8	Kota Tangerang	109	99	108	105	Tidak Efisien
9	Kota Tangerang Selatan	108	99	102	103	Tidak Efisien
<b>Rata-rata</b>		<b>103</b>	<b>96</b>	<b>102</b>	<b>100</b>	

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi pemerintah di wilayah Jabodetabek tahun 2016-2018 maka dapat diketahui bahwa dari 9 daerah yang menjadi sampel 4 daerah mendapatkan kriteria tidak efisien ( Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) , 4 daerah lainnya mendapatkan kriteria kurang Efisien (Kabupaten bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi) dan 1 daerah mendapatkan kriteria Cukup Efisien yaitu Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta mendapatkan kriteria cukup efisien dengan presentase sebesar 89%, sedangkan Kota Tangerang mendapat presentase yang paling besar (tidak efisien) sebesar 105%. Faktor utama yang mengakibatkan tidak efisien/ kurangnya efisien pemerintah di wilayah Jabodetabek adalah tingginya pengeluaran yang dikeluarkan dalam hal ini adalah belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang dimiliki.

Hasil analisis Rasio efisiensi pemerintah di wilayah Jabodetabek tahun 2016-2018 patut menjadi sorotan. Hasil analisis ini menunjukkan masih rendahnya efisiensi di wilayah tersebut. Walaupun pendapatan asli daerah di wilayah Jabodetabek termasuk dalam kategori yang cukup tinggi namun hal itu masih belum mampu mengangkat tingkat efisiensi dikarenakan belanja yang dikeluarkan masih lebih besar. Pada tahun 2017 rasio efisiensi mendapatkan presentase yang paling efisien dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau sesudahnya yaitu sebesar 96%. Pada tahun 2016 mendapatkan presentase sebesar 103% dan tahun 2018 sebesar 102%.

### 3.4 Rasio Keserasian Belanja

Tabel 4. Rasio Keserasian Belanja  
Perhitungan Belanja Langsung  
Pemerintah di wilayah Jabodetabek tahun 2016-2018 dalam %

NO	Provinsi / kabupaten dan kota	2016	2017	2018	Rata- Rata	Kriteria
1	DKI Jakarta	47	52	51	50	Kurang Ideal
2	Kab. Bekasi	50	52	50	51	Ideal
3	Kab. Bogor	45	47	45	46	Ideal
4	Kab. Tangerang	63	64	63	63	Ideal
5	Kota Bogor	49	49	47	48	Kurang Ideal
6	Kota Depok	58	54	52	55	Ideal
7	Kota Bekasi	52	50	52	51	Ideal
8	Kota Tangerang	61	65	65	64	Ideal
9	Kota Tangerang Selatan	64	67	61	64	Ideal
<b>Rata-rata</b>		<b>54</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>Ideal</b>

Tabel 5. Rasio Kesenjangan Belanja Daerah  
Perhitungan Belanja Tidak Langsung  
Pemerintah di wilayah Jabodetabek tahun 2016-2018 dalam %

NO	Provinsi / kabupaten dan kota	2016	2017	2018	Rata-rata	Kriteria
1	DKI Jakarta	53	48	49	50	Kurang Ideal
2	Kab. Bekasi	50	48	50	49	Ideal
3	Kab. Bogor	55	53	55	54	Kurang Ideal
4	Kab. Tangerang	37	36	37	37	Ideal
5	Kota Bogor	51	51	53	52	Kurang Ideal
6	Kota Depok	42	46	48	45	Ideal
7	Kota Bekasi	48	50	48	49	Ideal
8	Kota Tangerang	39	35	35	36	Ideal
9	Kota Tangerang Selatan	36	33	39	36	Ideal
<b>Rata-rata</b>		<b>46</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>Ideal</b>

Berdasarkan perhitungan rasio keserasian belanja, maka dapat diketahui bahwa dalam periode 3 tahun (2016-2018) Pemerintah di wilayah Jabodetabek mengalokasikan belanja langsung hampir setengah lebih dari realisasi belanja daerah yaitu 55%. Pada tahun 2016 serapan belanja langsung dari pemerintah di wilayah Jabodetabek adalah 54%. Tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 56% dan tahun 2018 kembali menurun dengan presentase sebesar 54%.

Pemerintah di wilayah Jabodetabek dalam kurun waktu 3 tahun (2016-2018) mengalokasikan belanja tidak langsung dengan rata-rata sebesar 45%. Hal ini menandakan tingkat kinerja dalam belanja yang cukup baik dikarenakan belanja tidak langsung lebih rendah dari belanja langsung. Pada tahun 2016 pemerintah di wilayah jabodetabek tingkat belanja tidak langsung mendapat presentase sebesar 53%. Untuk tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 48%

dan tahun 2018 Belanja tidak langsung mengalami kenaikan dengan presentase 49%.

### 3.5 Rasio Pertumbuhan

Tabel 6. Rasio Pertumbuhan  
Pemerintah di wilayah Jabodetabek tahun 2016-2018 dalam %

NO	Provinsi / kabupaten dan kota	2016	2017	2018	Rata-rata
1	DKI Jakarta	10	19	-1	9
2	Kab. Bekasi	4	21	-9	5
3	Kab. Bogor	14	33	-8	13
4	Kab. Tangerang	11	36	3	17
5	Kota Bogor	25	25	-7	14
6	Kota Depok	13	31	-12	11
7	Kota Bekasi	7	24	1	11
8	Kota Tangerang	8	25	-6	9
9	Kota Tangerang Selatan	10	20	0	10
<b>Rata –rata</b>		<b>11</b>	<b>26</b>	<b>-4</b>	<b>11</b>

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan yang tertinggi terdapat pada tahun 2017 yaitu 26%. Tahun 2016 rasio pertumbuhan mendapatkan presentase sebesar 11%. Tahun 2018 menjadi tahun terburuk dalam rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan tahun 2018 mendapatkan penurunan yang sangat tajam dan mendapatkan presentase -4%.

Kabupaten Tangerang menjadi wilayah yang mendapatkan predikat terbaik dalam hal perhitungan rasio pertumbuhan dengan presentase sebesar 17%. Kabupaten Bekasi menjadi wilayah yang paling buruk dalam hal perhitungan rasio pertumbuhan dengan presentase 5%. Nilai pertumbuhan sangat dipengaruhi dengan pendapatan asli daerah yang mampu dihasilkan pada setiap tahunnya.

## 4. PENUTUP

Berdasarkan uraian analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa rasio kemandirian dalam periode 2016-2018 wilayah Jabodetabek mendapatkan rata-rata tingkat kemandirian yang sangat efektif. Rasio Efektifitas Pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek dapat dikatakan memiliki tingkat

efektifitas yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan tingkat presentase rasio efektifitas yang rata – rata menunjukkan diatas 100%. Hasil analisis Rasio efisiensi pemerintah di wilayah Jabodetabek tahun 2016-2018 patut menjadi sorotan. Rasio keserasian belanja Pemerintah di wilayah Jabodetabek memiliki tingkat belanja daerah yang tinggi. Jika dilihat dari kecenderungan belanja daerah maka pemerintah di wilayah Jabodetabek memiliki tingkat keserasian belanja yang baik dikarenakan belanja langsung yang lebih besar dari belanja tidak langsung. dalam periode 3 tahun (2016-2018). Rasio Pertumbuhan pemerintah di wilayah Jabodetabek jika dilihat dari rasio pertumbuhan selama 3 tahun (2016-2018) mengalami kenaikan dengan interval 5% - 17%.

Atas dasar kesimpulan serta keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka Penulis mengajukan rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Pemerintah di wilayah Jabodetabek diharapkan terus menggali potensi yang ada agar kedepannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendapatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel penelitian yang digunakan sehingga dapat menjangkau daerah disekitar sebagai wilayah pembanding.
- 3) Peneliti selanjutnya dapat menambah periode waktu pada penelitian selanjutnya untuk dapat mengetahui kecenderungan kinerja dalam 1 periode kepemimpinan kepala daerah.
- 4) Data yang digunakan agar tidak hanya sebatas data keuangan, tapi juga dapat menggunakan data non keuangan.
- 5) Peneliti selanjutnya dapat melengkapi rasio keuangan yang digunakan untuk penelitian agar memberikan perbandingan yang lebih luas dan lengkap

## **DAFTAR PUSTAKA**

Assidiqi, Bahrn. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Klaten Tahun 2008 – 2012*. Jurnal Profita Edisi 5.

- Fajriansyah, dkk. 2019. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2016 – 2017*. Jurnal EMBA Vol.7 No.3 Juli 2019, Hal. 4465-4474, ISSN 2303-1174.
- Kusumadewi, Ilat. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014*. Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 634-644, ISSN 2303-1174.
- Katit, Pinantik sherly. 2016. *Analisis Kinerja Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua*. Jurnal EMBA Vol.4 No.3 September 2016, Hal. 572-582, ISSN 2303-1174.
- Lubis, Hafni Nurlia. 2017. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013*. KITABAH: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2017.
- Mahsun, Moh., Firma Sulistyowati & Heribertus Andre Purwanugraha. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang “*Pemerintahan Daerah*”. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang Undang No. 25 Tahun 1999 tentang “*Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*”. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang “*Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*”. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang “*Pemerintahan Daerah*”. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang “*Pemerintahan Daerah*”. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005, tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Poyoh, C.M., dkk. 2017. *Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 745 – 752, ISSN 2303-1174.
- Pramono, Joko. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*. Jurnal Ilmiah Among Makarti. Vol. 7 No. 13: 83-112.

- Rahmawati, Putra. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012*. E--- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.15.3.Juni (2016):1767--- 1795, ISSN: 2302--- 8556.
- Ramadhani, F.R., 2016. *Analisis Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010 – 2015*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 14, No. 01 Juni 2016.
- Susanto, Hery. 2019. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram*.Jurnal Distribusi Vol. 7, No. 1 – Maret 2019, Halaman 81 s.d 92, P – ISSN 0853- 9571.
- Suryantini, dkk. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. Prosiding Seminar Nasional AIMI. Jambi, 27 – 28 Oktober 2017, ISBN: 1234-5678-90-12-1.
- Tantri, Irmawati Putri. 2018. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016*. JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 1 No 1 Hal 27-37 Maret 2018.